

II

***Indigenous People* di Kanada dan United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People**

2.1. Indigenous People di Kanada

2.1.1. Sejarah *Indigenous People* Kanada

Jose Martinez-Cobo menjelaskan *Indigenous People* sebagai komunitas, orang – orang dan bangsa yang memiliki kontinuitas sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di daerah atau teritori milik mereka, dan menganggap diri mereka berbeda dari sektor masyarakat lainnya yang sekarang berada di wilayah tersebut atau bagian dari wilayah tersebut (Martinez-Cobo dalam Keal, 2003: p.7). Sedangkan menurut Taiaiake Alfred dan Jeff Corntassel istilah *indigenous people* atau masyarakat adat adalah sesuatu yang dibangun, dibentuk dan hidup dalam konteks politik dari kolonialisme kontemporer (Alfred & Corntassel 2005).

Seperti yang telah diketahui, di Kanada sekelompok besar dari masyarakat adat menyebut diri mereka sebagai '*first nations people*'. Istilah *first nations* sendiri memiliki definisi yang berbeda – beda. Menurut Robert James Muckle, istilah first nations merujuk kepada sekelompok orang yang dapat mengusut nenek moyang mereka pada populasi yang telah mendiami apa yang sekarang disebut dengan Kanada sebelum datangnya orang – orang Eropa dan Amerika pada akhir abad ke – 18.

Salah satu dugaan yang populer dikalangan antropologis adalah bahwa masyarakat adat yang tersebar disepanjang benua Amerika pertama kali datang pada periode akhir zaman es (Green, 2010: p. 3). Manusia pada zaman itu masih nomaden, yang berarti hidup berpindah – pindah serta masih mengandalkan sistem *food gathering* atau mengumpulkan bahan makanan. Mereka melakukan migrasi ke wilayah benua Amerika melewati apa yang sekarang disebut sebagai Selat Bering dari wilayah Asia. Pada zaman itu, Selat Bering disebut dengan Beringia, dan wilayahnya menghubungkan wilayah Asia hingga ke Alaska. Selat Bering dapat dilewati karena mengalami penurunan permukaan air, sehingga membentuk sebuah jembatan alami yang dapat dilewati oleh manusia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 12,000 – 30,000 tahun yang lalu (Green, 2010: p. 3). Migrasi ini terjadi secara besar – besaran, sehingga membuat banyak sekelompok besar manusia yang memiliki kesamaan Bahasa dan budaya mendiami apa yang sekarang menjadi Benua Amerika. Kelompok besar itulah yang kemudian menjadi manusia – manusia pertama yang mendiami wilayah benua Amerika yang kemudian disebut sebagai *indigenous people*, atau *first nations people* di Kanada.

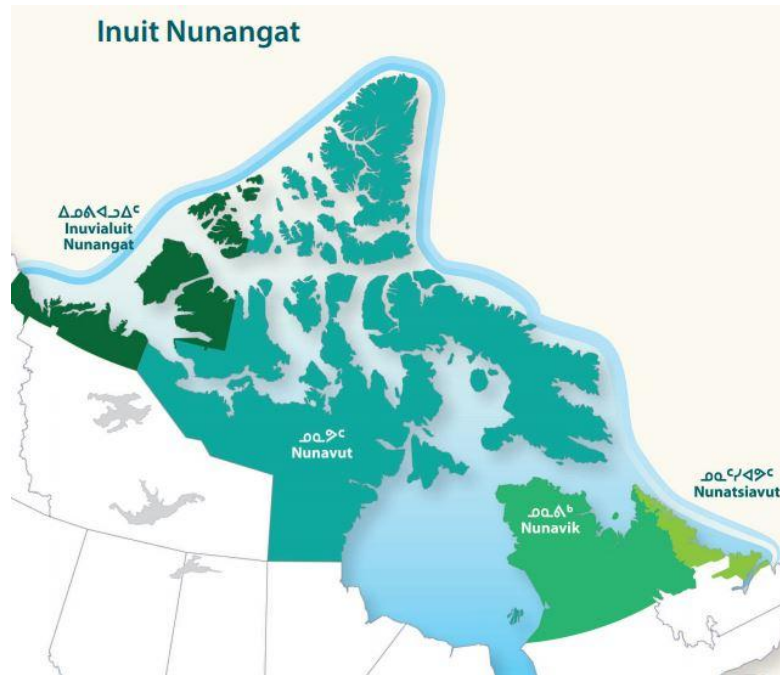
2.1.2. Pembagian Wilayah dan Suku

Masyarakat adat mendiami dan tersebar di seluruh daratan Kanada. Namun, untuk mempermudah, para ahli mengelompokkan masyarakat adat berdasarkan pada wilayah geografis dimana masyarakat adat ini tinggal. Kelompok tersebut ada enam, yakni: ***Woodland First Nations***, yang hidup di wilayah hutan boreal yang lembab di sebelah timur wilayah Canada; ***Iroquoian First Nations***, yang mendiami wilayah paling selatan dari Kanada, dimana wilayah tersebut memiliki tanah yang cukup subur dan cocok untuk menanam jagung, kacang dan labu; ***Plains First Nations***, yang hidup di wilayah padang rumput; ***Plateau First Nations***, yang wilayah geografisnya meliputi daerah semi padang pasir di wilayah selatan, hingga wilayah pegunungan yang tinggi serta

hutan yang lembab dan gelap di wilayah utara; *Pacific Coast First Nations*, yang wilayahnya memiliki akses melimpah terhadap salmon sebagai pangan dan kayu cedar merah sebagai material membangun rumah; *First Nations of the Mackenzie and Yukon River Basins*, yang mana wilayah mereka terdiri dari lingkungan yang keras, yakni hutan yang gelap, tanah yang tandus, serta lahan yang mirip dengan rawa – rawa yang biasa disebut dengan muskeg (Aboriginal Affairs and Northern Development Kanada, p. 8).

Selain itu ada lagi suku yang dinamakan dengan Inuit. Suku ini tidak termasuk dalam daftar kelompok masyarakat adat yang dikelompokkan secara geografis karena suku ini mendiami wilayah yang cukup luas, tidak hanya wilayah Kanada saja. Selama lebih dari 5000 tahun, orang – orang dan kebudayaan yang disebut dengan Inuit telah mendiami wilayah teritori luas yang meliputi wilayah pantai semenanjung Chukchi di Rusia, seberang timur Alaska dan Kanada, dan pantai tenggara Greenland (Inuit Tapiriit Kanatami, 1999). Wilayah di Kanada yang didiami oleh orang – orang Inuit adalah wilayah Kanada bagian utara. Meskipun berasal dari suku yang sama, Inuit di masing – masing wilayah dimana mereka tinggal memiliki Bahasa masing – masing. Inuit di wilayah Kanada menggunakan Bahasa Inuktitut.

Gambar 3: Peta Letak Wilayah Inuit Nunangat di Kanada (Inuit Tapiriit Kanatami 2018)



(sumber: <https://www.itk.ca/wp-content/uploads/2018/08/Inuit-Statistical-Profile.pdf>)

Masyarakat Inuit di Kanada tinggal di 53 komunitas yang tersebar di wilayah Utara Kanada. Masyarakat Inuit menyebut wilayah tempat tinggal mereka sebagai Inuit Nunangat yang berarti tempat dimana orang – orang Inuit tinggal (Indigenous and Northern Affairs Canada, 2012). Inuit Nunangat sendiri terbagi mejadi empat wilayah, yakni Inuvialuit yang terletak di wilayah *Northwest Territory* dan Yukon, kemudian Nunavik yang terletak di wilayah utara Quebec, Nunatsiavut yang terletak di wilayah Labrador dan wilayah terakhir adalah Nunavut. Secara keseluruhan, berdasarkan sensus tahun 2016, populasi masyarakat Inuit di Kanada mencapai 65.000 orang. Mayoritas sebesar 73% diantaranya tinggal di wilayah Inuit Nunangat (Inuit Tapiriit Kanatami, 2018)

Dahulu, banyak orang yang menggunakan istilah ‘*Eskimo*’ saat menyebut sekelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah dekat kutub. Namun, istilah tersebut hampir tidak digunakan sama sekali dan menggunakan sebutan yang seharusnya, yakni Inuit. Istilah *Eskimo* sendiri dalam Bahasa Algonquian merupakan istilah yang merendahkan, karena memiliki arti sebagai ‘pemakan daging mentah’ (Inuit Tapiriit Kanatami 1999). Istilah tersebut juga sebenarnya dikategorikan sebagai *racial slur*, karena istilah tersebut sangat menyinggung orang – orang Inuit.

Kelompok masyarakat adat lainnya adalah Métis. Kelompok ini muncul pada era tahun 1700-an, dimana kelompok ini merupakan keturunan dari perkawinan campuran antara pedagang bulu dan pemburu kerbau dari Skotlandia dan Perancis dengan penduduk asli (*indigenous*) setempat (Cox 1999). Mereka membentuk komunitas mereka sendiri, serta memiliki kebudayaan mereka sendiri. Métis sendiri berasal dari kata *métisser* yang merupakan Bahasa Perancis (Canadian Geographic, 2018). Masyarakat Métis tidak hanya ada di Kanada saja, namun juga di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan wilayah dimana Métis berkembang adalah wilayah *Great Lakes* yang meliputi 8 negara bagian Amerika Serikat dan juga Provinsi sebelah barat Kanada, yakni Ontario.

Munculnya komunitas masyarakat Métis ini dapat dihubungkan dengan perintah Samuel de Champlain, seorang penjelajah Perancis, kepada sekutu masyarakat adatnya bahwa para pemuda dalam krunya akan menikahi gadis – gadis anggota masyarakat mereka. Tujuan dari perintah ini sendiri untuk meningkatkan populasi dan menguatkan klaim Perancis atas wilayah Kanada tersebut (McMillan & Yellowhorn, 2004). Pernikahan campuran yang dilakukan oleh pedagang bulu dari Perancis juga dilakukan dengan maksud untuk mempererat hubungan dagang antara masyarakat adat setempat dengan para pedagang bulu. Istri dari kalangan masyarakat adat memiliki peran sebagai penerjemah antara suami pendatangnya yang berprofesi sebagai pedagang bulu.

Gambar 4: Kesenian Tari dari Masyarakat Metis, Red River Jig atau Metis Jig (CBC News 2017)



(Sumber: <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/traditional-m%C3%A9tis-jig-takes-stage-at-coastal-first-nations-dance-festival-1.4000155>)

Tidak jarang identitas orang – orang metis disalahartikan oleh orang – orang non-metis. Orang – orang Métis bersikeras bahwa mereka adalah bagian dari kelompok budaya tersendiri. Sedangkan orang – orang non-métis mengartikan bahwa orang – orang metis ini hanyalah sekelompok orang yang memiliki keturunan campuran antara pendatang Eropa dengan warga masyarakat adat setempat (Indigenous Foundation, 2011). Memang, orang – orang metis memiliki kebudayaan tersendiri. Ada beberapa bagian dari kebudayaan mereka yang merupakan gabungan dari dua kebudayaan yang berbeda. Kehidupan yang dijalani oleh orang – orang metis bukanlah tipe kehidupan yang diam dan tenang. Kebudayaan dari orang – orang metis dipandang sebagai salah satu kebudayaan masyarakat adat yang cukup meriah (Vizina, 2008). Beberapa bentuk kebudayaan masyarakat metis adalah pacuan kuda dan seni tari. Salah satu tarian dari masyarakat metis yang cukup terkenal adalah ‘*The Red River Jig*’.

2.1.3. Kebudayaan Indigenous People

Pada kalangan masyarakat adat semua hal yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan seperti dongeng, disampaikan dari generasi ke generasi dengan cara menceritakan kembali secara oral atau lisan. Memang tercatat ada peradaban besar masyarakat adat seperti Aztec dan Inca yang meninggalkan artefak yang meliputi tulisan. Namun masyarakat adat di Kanada diketahui jarang meninggalkan jejak sejarah yang berupa tulisan. Peninggalan sejarah mereka lebih kepada artefak yang berupa pada patung – patung, simbol, pahatan, dan benda – benda hasil kebudayaan lainnya.

Masyarakat adat di Kanada terdiri dari banyak suku yang tersebar diseluruh wilayah Kanada. Secara politis, kelompok masyarakat adat bisa dibedakan menjadi tiga, yakni Inuit, Metis dan First Nations. Salah satu prinsip hidup mereka adalah hidup selaras dengan alam. Mereka mengambil kebutuhan baik yang bersifat material maupun spiritual mereka dari alam (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2013: p. 8). Masyarakat adat tidak mengkategorikan kepercayaan spiritual mereka sebagai Agama, karena menurut mereka istilah ‘agama’ dirasa kurang cocok. Namun, mereka percaya dengan kehadiran faktor supernatural dalam segala aspek kehidupan mereka.

Dalam kalangan masyarakat adat, budaya oral memiliki peran yang cukup besar. Karena sebagian besar dari sejarah mereka diceritakan secara turun temurun oleh para pendahulu mereka. Salah satu tradisi oral yang juga merupakan bagian dari budaya masyarakat adat adalah mendongeng (*storytelling*). Melalui dongeng – dongeng yang diceritakan, muncul mitos – mitos dan juga berbagai macam cerita rakyat dikalangan masyarakat adat. Tradisi bercerita atau mendongeng yang dilakukan oleh masyarakat adat dapat dibidang membantu mereka sebagai sarana untuk menjaga kelestarian tradisi, kebudayaan dan sejarah dalam komunitas mereka untuk generasi selanjutnya.

Masyarakat adat di Kanada memiliki bentuk kesenian yang cukup beragam. Terdiri dari seni musik, tari, dan rupa, setiap suku pun memiliki bentuk kesenian khasnya masing – masing. Tiap bentuk kesenian memiliki arti masing – masing. Baik sebagai bentuk hiburan semata, ataupun sebagai bentuk ritual suci. Sebagai contoh, masyarakat adat Cree dari wilayah dataran tinggi yang memiliki tradisi untuk menarikan apa yang mereka sebut sebagai tarian ‘Mâhtahitowin’ atau dapat diartikan sebagai ‘*the give away dance*’. Tarian ini dilaksanakan ketika mendekati waktu musim dingin. Pada saat melaksanakan tradisi ini, penduduk Cree juga berdoa untuk memohon umur yang panjang dan juga musim perburuan yang baik (Government of Alberta, n.d).

Sehubungan dengan kesenian yang terbilang sakral, instrumen musik seperti drum dalam kebudayaan beberapa masyarakat adat dianggap sebagai instrumen musik yang sakral. Dalam kebudayaan masyarakat adat Dene Tha' menganggap drum sebagai alat musik yang sakral karena mereka menganggapnya sebagai salah satu instrumen untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Selain itu mereka juga menggunakan drum dalam ritual – ritual untuk menyanyikan lagu – lagu upacara keagamaan mereka, serta dalam penghormatan kepada tetua suku, ibu, anak maupun kepada alam (Government of Alberta, n.d)

Bentuk 'pemerintahan' dari masyarakat adat di Kanada sangatlah berbeda dengan apa yang ada di Eropa, yang mana disana banyak terdiri dari kerajaan – kerajaan yang tersebar diseluruh wilayah daratan Eropa. Masyarakat adat biasanya tinggal disebuah komunitas desa dan biasanya memiliki sedikit kontak dengan ang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam pemilihan pemimpin, tidak ada pemilihan dalam masyarakat adat. Pemimpin Desa atau suku mereka biasanya adalah seorang pria tua yang dihormati di desa tersebut. Cara para pemimpin masyarakat adat mengambil keputusan yakni melalui proses diskusi yang panjang dan mencapai sebuah konsensus bersama. Karena tidak ada proses pemilihan pemimpin, warga desa yang tidak setuju dengan keputusan dapat meninggalkan komunitas desa tersebut kapanpun (Nichols 2018, p. 2).

Masyarakat adat juga memiliki berbagai macam Bahasa. Berbagai Bahasa tersebut juga dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tersendiri. Beberapa ahli mengatakan bahwa ada Bahasa yang satu dan lainnya hampir sama, namun diucapkan dengan logat yang berbeda di tiap wilayah. Jenis Bahasa adat dikelompokkan ke dalam sebelas kategori. Pertama adalah *Algonquian* yang terdiri dari banyak Bahasa adat yang termasuk cukup dikenal. Yakni Cree, yang banyak digunakan di wilayah utara Quebec hingga ke pegunungan Rocky, Ojibwa yang digunakan dari wilayah selatan Ontario hingga ke Saskatchewan. Jenis Bahasa adat lainnya yang termasuk ke dalam kategori Algonquian yakni Mi'kmaq dan Maliseet yang banyak digunakan di daerah pesisir, Innu (Montaignais – Naskapi) di wilayah utara Quebec hingga Labrador, Blackfoot di wilayah Alberta, dan Beothuk yang sudah punah di wilayah Newfoundland (McMillan & Yellowhorn, 2004).

Kategori selanjutnya adalah *Athapaskan* yang terdistribusikan dari wilayah Alaska hingga ke wilayah Hudson Bay. Beberapa jenis Bahasa yang masuk ke dalam kategori ini yakni adalah Gwich'in, Hare, Dogrib, Han, Tutchone, Chipewyan, Slavey, Beaver, Kaska, Sekani, Tahltan, Carrier, Chicotin dan Sarcee (McMillan & Yellowhorn, 2004). Beberapa wilayah yang memiliki banyak penghuni berbahasa tipe Athapaskan berada di wilayah Sub-arctic sebelah barat dengan beberapa ada yang mendiami wilayah dataran tinggi dan lembah.

Kategori ketiga adalah Bahasa *Iroquoian*. Di Kanada, Bahasa Iroquoian seperti Huron sekarang sudah termasuk punah. Jenis Bahasa Iroquoian yang tersisa di wilayah Ontario dan Quebec adalah yang termasuk ke dalam “*Six Nations*” atau “*League of the Iroquois*” yang asal aslinya adalah dari sebelah utara New York. Jenis yang mendominasi adalah Mohawk, sedangkan jenis lainnya seperti Cayuga, Oneida, Onondaga, Seneca dan Tuscarorra keberadaannya terancam (McMillan & Yellowhorn, 2004).

Kategori selanjutnya yakni *Salishan*, tersebar di seluruh wilayah pesisir British Columbia, serta di daratan dan juga di Pulau Vancouver. Salah satu jenis Bahasa yang termasuk dalam kategori ini, yakni Nuxalk, merupakan salah satu contoh yang terisolasi di wilayah pesisir tengah. Kategori Bahasa ini sangatlah dominan di wilayah dataran tinggi terdekat, di wilayah dalam bagian selatan British Columbia. Tipe Bahasa adat dalam kategori ini yang termasuk dalam Bahasa pesisir adalah Nuxalk, Comox, Sechelt, Squamish, Halkomelem, dan Straits. Sedangkan Bahasa lembah diantaranya meliputi Stl'atl'imx (Lillooet), Nlaka'pamux (Thompson), Secwepemc (Shuswap) dan Okanagan (McMillan & Yellowhorn, 2004).

Kategori berikutnya adalah *Eskimo-Aleut*, yang mana kategori Bahasa adat ini juga dapat ditemukan di wilayah Alaska dan Siberia. Sedangkan Inuit di wilayah Kanada berbicara satu dialek yakni Inuktitut. Inuit di wilayah Greenland diketahui juga menggunakan Bahasa ini (McMillan & Yellowhorn, 2004).

Mereka yang berbicara Bahasa yang termasuk dalam kategori *Wakashan* menghuni wilayah daratan pesisir tengah dari British Columbia dan juga wilayah bagian utara dan barat Pulau Vancouver. Komunitas disebelah utara, yang dulu secara keliru pernah disebut sebagai “Kwakiutl” yakni adalah Bahasa yang sekarang disebut Heiltsuk, Kwakwaka'wakw, dan Haisla. Bahasa Wakashan yang ada di wilayah Selatan, yang berada di sepanjang pantai barat Pulau Vancouver, secara historis disebut sebagai “Nootka”, namun sekarang disebut sebagai Nuuchahnulth.

Pada kategori *Siouan*, hanya ada satu Bahasa masyarakat adat Kanada dengan dua dialek yang dominan, yakni Dakota dan Nakota. Keduanya terdapat di wilayah selatan dari tiga provinsi yang didominasi oleh wilayah padang rumput. Masyarakat adat yang memiliki aksen Dakota datang dan mendiami wilayah Saskatchewan dan Manitoba pada abad ke 19. Sedangkan Assiniboine di Saskatchewan dan Manitoba dan masyarakat Stoney di wilayah selatan Alberta berbicara dengan aksen Nakota.

Kelompok Bahasa selanjutnya yakni *Tsimshian*. Tercatat, banyak orang yang bercakap – cakap dengan beberapa Bahasa yang berhubungan dekat dengan kelompok Bahasa Tsimshian di wilayah pantai sebelah utara British Columbia. Masyarakat Nisga'a di area lembah sungai Nass dan Gitskan disepanjang aliran sungai Skeena berbicara dengan dialek Bahasa Tsimshian yang berbeda. Tipe Bahasa Tsimshian pesisir digunakan dari daerah bawah Skeena dan pulau – pulau lepas pantai dan juga Tsimshian selatan di pulau – pulau terluar bagian selatan berbicara dengan dialek dari Bahasa kedua.

Kelompok bahasa selanjutnya yakni *Haida* yang dapat ditemukan di Haida Gwaii, yang juga dikenal sebagai Queen Charlotte Islands. Bahasa mereka terisolasi, karenanya tidak dapat ditemukan Bahasa lain yang memiliki kemiripan dengan kelompok Bahasa Haida ini. Kategori Bahasa selanjutnya yakni adalah *Tlingit*. Mereka yang berbahasa Tlingit sebagian besar mendiami kepulauan di tenggara Alaska. Namun, distribusi Bahasa mereka mencakup luas yang cukup ekstrim. Yakni mencakup wilayah barat laut British Columbia dan sebelah selatan Yukon. Karenanya, banyak ahli yang berspekulasi bahwa kelompok Bahasa Tlingit sebenarnya memiliki hubungan jauh dengan kelompok Bahasa Athapaskan.

Kelompok Bahasa *Kutenai* keberadaanya terbatas di tenggara British Columbia saja. Banyak ahli Bahasa yang tertarik dengan Bahasa ini karena Bahasa ini tidak memiliki hubungan dekat dengan Bahasa lainnya. Namun, ada percobaan untuk meneiliti kedekatan Bahasa ini dengan kelompok Bahasa lain seperti Algonquoian dan Salishan. Namun penelitian tersebut tidak meyakinkan sehingga hingga saat ini kelompok Bahasa Kutenai tergolong terisolasi.

2.1.4. Dinamika Konflik dengan Pendatang dari Eropa

Sebelum menjadi Kanada yang sekarang ini, beberapa kali Kanada menjadi pemberhentian bagi para penjelajah dari Eropa. Mulai dari bangsa Viking, hingga penjelajah Eropa lainnya yang kemudian mendiami dan mengklaim wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kanada. Ketertarikan para penjelajah dari Eropa bermula dari cerita yang beredar dikalangan para penjelajan Eropa mengenai sebuah perairan yang sangat kaya di sepanjang pantai Samudera Atlantik. Kemudian, pada awal era tahun 1500-an, para penjelajah dari Perancis, Inggris dan Portugis mulai melakukan ekspedisi penangkapan ikan disekitar Newfoundland. Pada akhir era 1500-an, para penjelajah Eropa mulai berpikir bahwa perdagangan bulu lebih menguntungkan (Green, 2010: p. 105).

Penjelajah Eropa yang cukup terkenal akan eksplorasinya di wilayah Kanada yakni Jacques Cartier, seorang penjelajah yang berasal dari Perancis. Saat menjelajah disekitar wilayah St. Lawrence, ia dan krunya menghindari keserakahan dan aksi kekerasan dari pihak Spanyol. Sesampainya ia di wilayah Kanada, sebagian suku masyarakat adat telah membuka hubungan perdagangan secara informal dengan kapal – kapal pencari Ikan Eropa di sepanjang pantai (Nichols, 2018: p. 4).

Saat ia menyebrangi wilayah Samudera Atlantik, Cartier sendiri tidak tahu menahu tentang masyarakat adat di daratan Kanada. Hal tersebut terlihat cukup jelas dari aksinya pada waktu awal saat ia tiba di perairan Kanada. Kapal milik Cartier didekati oleh sekelompok anggota masyarakat adat yang kemudian ditembaki dengan senjata api oleh kru kapal Cartier (Nichols, 2018). Setelah sadar bahwa warga masyarakat adat yang ditembakinya bermaksud untuk berdagang, ia menghentikan serangannya. Setelahnya, ia berlanjut untuk melakukan perdagangan dengan orang – orang anggota masyarakat adat.

Hal tersebut tidak berarti menandakan bahwa Cartier ‘menerima’ orang – orang masyarakat adat yang berdagang dengannya. Ia memanfaatkan arahan orang – orang masyarakat adat sebagai penunjuk sumber kekayaan yang disebut – sebut berada di lembah Saint Lawrence. Cartier tidak segan – segan untuk menculik dua anak lelaki dari Kepala suku Donnacona, dari suku Stadacona. Penculikan tersebut menghancurkan hubungan yang dimilikinya dengan orang – orang masyarakat adat di wilayah tersebut. Kedua anak lelaki yang diculik oleh Cartier pun dibawa kembali ke Perancis dan kedua anak tersebut menceritakan mengenai kekayaan yang ada di tempat asal mereka, yang menyulut semangat Perancis untuk mengirimkan koloni dan menaklukan daratan yang sekarang dikenal sebagai Kanada tersebut.

Sebelum mengalami kontak dengan pendatang dari Eropa, sifat penyakit yang diderita oleh masyarakat adat lebih bersifat episodik dan kronis (Martin, 2002). Setelah masyarakat adat di Kanada mengalami kontak dengan pendatang Eropa, penyakit yang diderita oleh masyarakat adat mulai berubah. Hal tersebut dikarenakan oleh pendatang dari Eropa yang tidak hanya membawa diri dan kebudayaan dari wilayah asal mereka. Mereka juga membawa penyakit yang berasal dari wilayah mereka. Penyakit yang berasal dari Eropa sebagian besar cenderung bersifat akut dan epidemis (Martin, 2002). Beberapa penyakit seperti rabies, hepatitis, herpes dan disentri memang sudah ada terlebih dahulu di

daratan benua Amerika sebelum adanya kontak dengan pendatang dari Eropa. Namun, penyakit – penyakit seperti pes, demam berdarah (*scarlet fever*), tuberculosis, kolera, difteri, cacar, influenza, demam kuning dan penyakit gondok bukanlah jenis – jenis penyakit yang sudah ada di daratan benua Amerika sebelumnya. Penyakit tersebut datang bersamaan dengan para pendatang dari Eropa. Tubuh masyarakat adat pada saat itu juga tidak memiliki imunitas alami terhadap penyakit – penyakit tersebut. Tidak seperti pendatang dari Eropa yang telah memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap penyakit – penyakit tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang meninggal karena wabah penyakit ‘baru’ tersebut.

Dalam sejarah, sangat sedikit yang menyebutkan mengenai adanya perbudakan yang dilakukan oleh pada pendatang dari Eropa kepada masyarakat adat di Kanada. Banyak buku sejarah yang tidak menuliskan mengenai adanya perbudakan dalam sejarah Kanada. Memang, bagi budak kulit hitam, Kanada adalah tujuan kemana mereka melarikan diri dari perbudakan dari wilayah Amerika Serikat. Namun, di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kanada juga tidak bebas dari perbudakan. Banyak orang Kanada yang percaya bahwa praktik perbudakan hanya ada di Koloni Selatan yang memiliki perkebunan. Namun, ternyata praktik perbudakan dapat ditemukan di wilayah Quebec, Montreal, Three Rivers serta dalam perdagangan bulu dan juga benteng – benteng militer (Calverley dalam Neeganagwedgin, 2012).

Salah satu tokoh dari bangsa Metis, Howard Adams, mengatakan bahwa pada zaman itu, budak – budak secara rutin diperdagangkan seperti hewan ternak di pasar- pasar di kota Quebec dan Montreal (Neeganagwedgin, 2012). Sejarawan Kanada, Afua Coopers juga mengatakan bahwa praktik perbudakan dilakukan oleh penjajah Inggris dan Perancis. Bahkan juga terinstitusional dan dipandang sebagai hukum di Kanada selama dua Abad. Meskipun memang ada suku – suku masyarakat adat yang menjalin hubungan sebagai sekutu dengan pendatang Eropa, tidak membuat suku – suku masyarakat adat lainnya kebal dari praktik perbudakan (Neeganagwedgin, 2012).

Menurut Rushforth, meskipun banyak sejarawan yang mencatat adanya persekutuan antara masyarakat adat dengan pendatang dari Eropa, banyak yang melupakan bahwa masyarakat adat tidak kebal terhadap praktek perbudakan (Rushforth dalam Neeganagwedgin 2012). Kenyataan seperti inilah yang menjadi sebab mengapa sistem pendidikan dan sekolah – sekolah di Kanada harus mulai untuk mengakui bahwa masyarakat adat juga merupakan bagian dari korban perbudakan (Neeganagwedgin, 2012).

Setelah pendatang dari Eropa mulai membentuk pemerintahan dan mendirikan Kanada di Abad ke 18, Pemerintah Kanada masih berusaha untuk memaksakan masyarakat adat untuk berasimilasi kepada masyarakat pendatang Eropa. Salah satu caranya adalah dengan memasukan anak – anak dari masyarakat adat kedalam *Residential School*. Sistem sekolah tersebut tercatat sebagai salah satu sejarah kelam bagi Kanada. Bagi warga masyarakat adat, sistem sekolah tersebut sangatlah kejam dan dinilai tidak manusiawi. Masyarakat adat juga tidak semata – mata menyerahkan anak – anaknya ke sekolah tersebut dengan sukarela. Seringkali anak – anak dari masyarakat adat dipisahkan oleh para petugas yang ada di *residential school* dari keluarga dan orangtuanya. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang menculik anak – anak dari tempat tinggalnya untuk dimasukan ke *Residential school*. Tertulis dalam

laporan *Truth and Reconciliation Commission* mengenai sistem residential school, jika ada anak – anak yang meninggal dalam *residential school* tersebut, petugas yang ada di sekolah ini akan menguburnya dalam kuburan massal yang tidak memiliki tanda.

Pendiri dari *Residential School* pertama di wilayah Kanada adalah para misionaris yang datang dari Eropa. Sekolah – sekolah ini berbasis agama, selain itu mereka memiliki tujuan untuk memaksa anak – anak dari masyarakat adat yang ‘bersekolah’ di sekolah tersebut untuk berasimilasi dengan kebudayaan Eropa. Anak – anak banyak yang dipisahkan dari orang tua mereka. Orang tua bahkan ketua suku mereka sebenarnya tidak mengizinkan anak – anak mereka untuk pergi begitu jauh ke tempat yang mereka tidak tahu dan tidak dapat dikunjungi (Truth And Reconciliation Commission Of Canada, 2015). Mereka takut dengan kemungkinan anak – anak mereka jatuh sakit maupun meninggal.

Para orangtua dari anak – anak masyarakat *indigenous* tidak setuju maupun menyukai ide untuk mengirimkan anak – anak mereka ke sekolah – sekolah tersebut. Takut apabila anak – anak mereka tidak kembali dan juga akan melupakan nilai – nilai kebudayaan dari tradisi mereka (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). Maka dari itu, karena banyak *residential school* yang ditutup karena rendahnya minat orang tua terhadap sekolah itu, pemerintah federal Kanada membuat kebijakan agar para orang tua tidak memiliki alternatif lain selain mengirimkan anak – anak mereka ke sekolah tersebut.

Mereka dilarang untuk menggunakan bahasa ibu mereka, yakni bahasa etnis suku mereka masing – masing. Anak – anak yang baru datang langsung ‘dibersihkan’ dari identitas kebudayaannya. Mereka dimandikan, rambut panjang mereka yang menjadi identitas kebudayaan masyarakat mereka dicukur dan pakaian mereka diganti dengan seragam sekolah (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). Pengalaman yang mereka dapatkan selama

berada di sekolah bukanlah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kasus kekerasan seksual juga marak terjadi di banyak *residential school*. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sekolah yang sangat terisolasi dari pengaruh dunia luar (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). Bahkan banyak dari mereka yang merupakan salah satu murid terakhir dari sistem *residential school* masih mengalami trauma hingga mereka menginjak usia yang sudah lanjut.

Kegiatan tidak selamanya berbau akademik. Bahkan salah satu murid, Tom, mengaku bahwa saat pertama kali ia datang ke sekolah tersebut setelah orangtuanya meninggal dunia, kepala sekolah menanyakan apakah ia bisa bekerja dengan sapi dan kuda (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). Wabah penyakit juga marak terjadi di *residential school* ini. Penyakit yang banyak menjangkit murid – murid adalah tuberculosis, yang juga merupakan epidemi di abad ke delapanbelas dan sembilan belas di Kanada (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). Pihak residential school sendiri tidak siap untuk memberikan perawatan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Banyak dari murid – murid yang diperintahkan untuk saling merawat teman mereka masing – masing. Bagi yang meninggal, kebanyakan tidak diberitahukan kepada orangtuanya apabila anak mereka telah meninggal dunia. Sepanjang tahun 1886 – 1996, ada sebanyak 6.000 anak – anak dari kalangan masyarakat adat yang meninggal di *residential school*.

Pihak pemerintah Kanada baru meminta maaf atas sistem residential school ini pada tahun 2008. Tepatnya pada saat masa pemerintahan Stephen Harper. Pihak pemerintah Kanada akhirnya membentuk *truth and reconciliation commission* sebagai tindakan lanjutan. Meskipun begitu, pemerintahan Stephen Harper masih banyak melakukan kelalaian terhadap masyarakat adat.

2.1.5. Kondisi Modern Indigenous People di Kanada

Sudah menjadi pengetahuan umum apabila Masyarakat masyarakat adat di Kanada hidup dan tinggal di suatu wilayah khusus yang disebut dengan reservasi. Wilayah Reservasi yang ‘diberikan’ oleh pemerintah berawal dari *British North America Act* yang disahkan pada tahun 1867 dan juga oleh Indian Act yang disahkan pada tahun 1876 (Wilson, 2018). Kedua undang – undang tersebut mengizinkan Pemerintah Kanada untuk memegang kendali atas wilayah yang diperuntukkan untuk masyarakat adat. Pemerintah Kanada sendiri memperuntukan Indian Act bagi masyarakat adat kecuali Metis dan Inuit, yang berarti untuk masyarakat *First Nations* saja.

Meskipun diperuntukan untuk masyarakat *first nations*, wilayah reservasi masih termasuk dalam wilayah federasi Kanada. Jadi, meskipun wilayah reservasi menjadi area yang dikhususkan untuk didiami oleh kelompok masyarakat first nations, mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas wilayah yang didiami oleh mereka. Pemerintah Kanada juga memegang kendali atas pendanaan untuk wilayah reservasi.

A. Permasalahan Ekonomi

- **Kesenjangan Ekonomi Antara Masyarakat Adat Dan Non-Masyarakat Adat.**

Salah satu yang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah permasalahan ekonomi. Kemiskinan banyak terjadi di wilayah reservasi. Istilah kemiskinan yang digunakan adalah dalam konteks dimana komunitas masyarakat adat memiliki sumber finansial yang terbatas, yang kemudian menyebabkan terjadinya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti tempat tinggal, makanan dan juga air bersih (Wien, 2017).

Tabel 1 : tabel perbandingan pendapatan per tahun antara masyarakat masyarakat adat dengan non – masyarakat adat

Indikator	Masyarakat Adat	Non- Masyarakat Adat
Persentase jumlah rumah tangga yang berpendapatan kurang dari \$10,000 per tahun	7.1	4.7
Persentase jumlah rumah tangga dengan pendapatan dibawah \$20,000	18.3	9.9
Median jumlah pendapatan tahunan rumah tangga	\$52,581	\$61,072
Persentase jumlah individu dengan pendapatan rendah setelah dipotong pajak	25.3	14.9
Persentase jumlah anak dibawah usia enam tahun, hidup dalam rumah berpendapatan rendah setelah dipotong pajak	35.0	18.1

(Sumber: Statistics Canada 2013a/2013b dalam Wien, 2017)

Dalam menggambarkan kemiskinan menggunakan indikator kemiskinan, ada banyak cara. Dalam gambar diatas, kemiskinan diukur dari segi perbandingan pendapatan. Jelas sangat terlihat dari tabel diatas bahwa ada kesenjangan pendapatan yang cukup besar antara masyarakat adat dan non-masyarakat adat (Wien, 2017). Dapat dilihat dalam gambar diatas, jumlah individu dengan pendapatan rendah setelah pendapatannya dipotong pajak jumlahnya lebih besar pada warga masyarakat adat dengan persentase sebesar 25.3 dengan pebandingnya, warga non masyarakat adat ada pada persentase

14.9. Perbandingan yang cukup jelas adalah pada perbandingan jumlah persentase rumah tangga dengan pendapatan rendah antara masyarakat masyarakat adat dan non masyarakat adat. Jumlah persentase rumah tangga dengan pendapatan rendah pada warga masyarakat adat lebih tinggi angkanya pada 18.3 persen, sedangkan warga non-masyarakat adat hanya mencapai 9.9 persen saja.

- **Krisis Tempat Tinggal Di Wilayah Reservasi Masyarakat Adat.**

Permasalahan lainnya yang dialami oleh masyarakat adat adalah krisis tempat tinggal. Permasalahan ini dialami oleh masyarakat adat yang tinggal baik di dalam wilayah reservasi maupun di luar wilayah reservasi. Namun, krisis ini lebih banyak dijumpai di wilayah reservasi yang tersebar di seluruh wilayah Kanada. Keadaan tempat tinggal masyarakat adat terbilang tidak layak untuk ditinggali. Tempat tinggal yang tidak layak tersebut kemudian berbuntut kepada masalah kesehatan yang terjadi dikalangan masyarakat adat (Webster, 2015).

Tempat tinggal yang kecil seringkali ditinggali oleh terlalu banyak orang sehingga tinggal berdesak – desakan. Banyak kasus dimana dalam satu rumah yang kecil dihuni oleh tiga generasi keluarga. Selain itu, rumah – rumah tersebut sangat membutuhkan renovasi total karena keadaannya yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Keadaan rumah – rumah yang tidak layak huni tersebut permasalahannya meliputi jamur, jendela yang rusak, instalasi listrik yang kurang aman dan juga tidak memiliki fasilitas sanitasi (mandi, cuci, kakus) yang layak. Sebesar 41.5 persen rumah di wilayah reservasi membutuhkan perbaikan. Berdasarkan laporan pada tahun 2011, ada sekitar 20.000 hingga 35.000 unit rumah yang harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat adat (Stastna, 2011). Namun, dewan first nations sendiri mencatat bahwa ada sejumlah 85.000 unit rumah yang perlu dibangun untuk mengatasi krisis tempat tinggal yang dialami oleh masyarakat adat ini.

Krisis tempat tinggal yang dialami oleh masyarakat adat ini kemudian menjadi akar dari permasalahan baru dikalangan masyarakat adat. Yakni adalah permasalahan kesehatan dimana karena banyak dari rumah – rumah di wilayah reservasi memiliki jamur (*mould*), penyakit pernapasan banyak diidap oleh warga masyarakat adat (Webster, 2015). Jamur yang tumbuh di rumah – rumah masyarakat adat sudah termasuk kategori berbahaya atau *toxic*. Tidak hanya masalah pernapasan, penyakit kulit pun juga menjangkiti anak – anak masyarakat adat. Penyakit pernapasan yang sering ditemui adalah *tuberculosis* dan juga penyakit kulit yang berupa ruam – ruam merah gatal. Karena tempat tinggal yang didiami oleh warga masyarakat adat dihuni beramai – ramai dengan anggota keluarga lainnya, angka penyebaran penyakit pernapasan seperti *tuberculosis* dikalangan masyarakat adat menjadi lebih tinggi daripada dikalangan masyarakat Kanada lainnya.

Pada tahun 2011, Pemerintah Kanada, melalui John Duncan, Menteri Urusan Masyarakat Adat dan Pembangunan Utara, menyampaikan bahwa kelompok - kelompok masyarakat adat memiliki tanggung jawab masing – masing dalam mengalokasikan dana perumahan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah (Stastna, 2011). Namun, menurut pimpinan kelompok masyarakat adat Kashechewan first nations, Jonathan Solomon, dana yang diberikan oleh pemerintah tidaklah cukup untuk menyelesaikan permasalahan tempat tinggal yang terjadi di wilayah resevasinya. Dana tersebut juga termasuk untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Dua tahun yang lalu, Solomon membantu menyelesaikan krisis tempat tinggal di komunitasnya dengan membangun 20 unit rumah di wilayah reservasinya (Stastna, 2011). Namun, sekarang ia butuh untuk merenovasi setidaknya 1.900 unit lagi untuk dibangun. Pelaksanaan renovasi atau pembangunanpun juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada kasus Jonathan Solomon, ia berbicara tentang bagaimana di wilayahnya tidak memiliki toko alat – alat pembangunan, maka material untuk melakukan renovasi harus diangkut menggunakan helikopter ke wilayahnya yang memakan biaya tidak sedikit.

Kontraktor yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan tempat tinggal masyarakat adat di wilayah reservasi beranggapan bahwa karena membangun di wilayah reservasi, kualitas rumah yang dibangun tidak dipermasalahkan. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh pemerintah federal, rumah – rumah di wilayah reservasi lebih cepat rusak dibandingkan dengan rumah – rumah yang berada di luar wilayah reservasi. Desain dari rumah yang dibangun tidak cocok dengan iklim dan situasi lingkungan yang ada di wilayah reservasi (Stastna, 2011). Biaya yang diperlukan oleh masing masing rumah yang membutuhkan renovasi juga tidak sedikit. Biaya yang dibutuhkan berkisar sekitar 1,6 juta dolar Kanada. Mengatasi kebutuhan biaya melalui pinjaman uang dari bank juga bukanlah opsi yang dapat dengan mudah dipilih karena permasalahan rendahnya pendapatan di kalangan masyarakat adat (Stastna, 2011).

B. Permasalahan di Bidang Sosial

- ***Indian Act* dan Identitas sebagai masyarakat adat**

Aturan mengenai wilayah reservasi dapat dirasa cukup ketat. Terhitung hingga tahun 1958, bagi warga *first nations* yang ingin pergi keluar dari wilayah reservasi meskipun hanya dalam waktu singkat, harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk meninggalkan wilayah reservasi dari Agen reservasi apapun alasannya (Wilson, 2019). Dibawah *Indian Act*, warga masyarakat adat terkhusus untuk *first nations* diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada *Indian Registry System (IRS)*. Sebelum adanya amandemen yang dilakukan pada *Indian Act* pada tahun 1985, syarat – syarat bagi seorang anggota masyarakat adat untuk mendapatkan status sebagai seorang warga masyarakat adat yang secara resmi terdaftar dalam catatan pemerintah cukup sulit. Seperti apabila seorang wanita masyarakat adat menikahi seorang pria yang bukan anggota masyarakat adat, wanita tersebut secara otomatis akan kehilangan statusnya, dan juga apabila memilih untuk tinggal diluar reservasi, statusnya dapat terancam.

Namun, setelah adanya perubahan dan amandemen melalui apa yang disebut dengan Bill C-31, wanita masyarakat adat masih bisa menjaga statusnya sebagai seorang warga masyarakat adat yang terdaftar dan juga bisa mengembalikan statusnya apabila namanya dihapus dari daftar resmi status warga masyarakat adat. Serta, warga masyarakat adat yang tinggal diluar reservasi dapat tetap menjaga statusnya sebagai warga masyarakat adat yang terdaftar dalam daftar nasional. Bahkan, status sebagai seorang warga masyarakat adat yang terdaftar dalam registrasi negara dapat memberikan sebuah *sense of belonging* dan dapat ditunjukkan sebagai bukti otentik mengenai garis keturunannya sebagai seorang warga masyarakat adat yang terdaftar (Indigenous Foundations n.d). Di sisi lain, adanya sistem registrasi seperti ini memberikan warga masyarakat adat yang tidak terdaftar atau non-status sebuah perasaan yang mempertanyakan apakah benar ia memiliki keturunan

masyarakat adat karena ia tidak terdaftar. Bahkan, seseorang yang merupakan anggota masyarakat adat namun tidak memiliki status resmi tidak dapat berpartisipasi dalam politik komunitas masyarakat adatnya (Indigenous Foundations n.d).

Maksud dari perumusan Indian Act sendiri adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat adat yang ada di Kanada. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, salah satu tujuan dari Indian Act sendiri adalah untuk mengatur status dari masyarakat adat. Bagaimana dan apa yang dapat membuat masyarakat adat dapat kehilangan statusnya sebagai masyarakat adat yang terdaftar. Selain itu, undang – undang ini juga memiliki maksud untuk mengatur kehidupan masyarakat adat yang berada di reservasi, serta mengatur tentang kelompok atau suku dari masyarakat adat. Undang - undang ini dibentuk pada tahun 1857 oleh pemerintah Federal Kanada.

Salah satu tujuan dari pembentukan Undang – undang *Indian Act* ini juga agar dapat mengatur kebudayaan dari masyarakat adat ini. Upacara adat seperti *potlatch* atau *powwow* menjadi dilarang dibawah undang – undang ini. Selain itu, produk yang sudah dihasilkan oleh undang – undang ini salah satunya adalah untuk berusaha membuat masyarakat adat untuk berlaku seperti masyarakat Kanada non-masyarakat adat (Indigenous Foundations, n.d). Usaha tersebut juga dapat dikatakan sebagai asimilasi. *Residential school* serta pelarangan praktik kebudayaan masyarakat adat seperti *pow wow* dan juga *potlatch* juga merupakan diantara produk hukum dari *Indian Act*.

- ***Missing and Murdered Indigenous Women and Girls***

Salah satu permasalahan sosial yang sangat krusial adalah mengenai *Missing and Murdered Indigenous Women (MMIWG)*. Kasus ini telah terjadi selama beberapa dekade lamanya dan menjadi sorotan banyak Organisasi Internasional seperti Amnesty Internasional yang kemudian membuat gerakan ‘*No More Stolen Sisters*’. Angka pasti dari korban MMIWG ini tidak pasti. Dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak Amnesty International Canada, hal ini disebabkan karena penanganan dari pihak kepolisian Kanada sendiri yang menyelidiki kasus hilangnya para wanita dan gadis masyarakat adat ini sebagai kasus orang hilang biasa. Penemuan jasad wanita masyarakat adat yang sebelumnya dilaporkan hilangpun hanya diperlakukan sebagai kematian yang tidak disengaja (*accidental death*) (Hansen, 2017). Pihak Kepolisian juga tidak dengan jelas mengungkap identitas dari jasad wanita masyarakat adat yang ditemukan, apakah dari pihak first nations, inuit atau metis. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh *Royal Canadian Mounted Police (RCMP)*, terhitung dari tahun 1980 hingga tahun 2012 terhitung ada sebanyak 1,017 wanita dan gadis dari masyarakat adat yang menjadi korban pembunuhan (Hansen, 2017).

Berawal dari kasus – kasus hilang dan terbunuhnya wanita dari komunitas masyarakat adat di Kanada yang tidak kunjung terselesaikan, hingga pada akhirnya kasus – kasus ini menumpuk dan menjadi permasalahan nasional. Laporan terakhir dari *National Inquiry of Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* disajikan pada bulan Juli 2019 lalu menyatakan bahwa sepanjang tahun 2001 hingga 2015, pihak mayoritas yang sangat rentan menjadi korban kekerasan adalah pihak wanita dari komunitas masyarakat adat, baik mereka yang menyandang status resmi maupun tidak memiliki status (National Inquiry into the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, 2019).

Kasus menghilang dan dibunuhnya wanita dan gadis dari masyarakat adat ini mulai ditangani dengan cekatan setelah Pemerintah Kanada yang menjabat pada periode sebelumnya menolak untuk melakukan review atau membentuk *National Inquiry*, yang resmi bertugas pada tahun 2016.

Pada laporan terakhir *National Inquiry* yang disampaikan pada bulan Juni 2019, dilaporkan bahwa ada temuan perbuatan atau aksi yang mengarah kepada tindakan genosida. Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada yang menjabat dalam pidatonya menyebut bahwa ia menerima temuan tindakan genosida yang disebutkan dalam laporan tersebut. Tindakan ini dianggap agak kontroversial dan beberapa anggota parlemen Kanada seperti Romeo Dallaire, yang sempat memimpin Pasukan Perdamaian PBB pada tahun 1994 di Rwanda, berpendapat bahwa penggunaan istilah Genosida tidaklah tepat (CBC News Canada, 2019). Namun, salah satu ahli hukum yang ikut merumuskan analisis dari laporan akhir *National Inquiry of Missing and Murdered Indigenous Women and Girls*, Fannie Lafontaine, menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita *CBC News Canada* bahwa penggunaan istilah genosida sendiri dilihat dari sudut pandang kolonialisme. Dalam laporan akhirnya, tertulis bahwa alasan mengapa kasus ini dapat dikategorikan sebagai genosida adalah karena kebijakan – kebijakan yang dulu dan baru – baru ini diterbitkan oleh Kanada, serta kelalaian dan aksi dari pemerintah Kanada adalah cukup untuk dikategorikan sebagai tindakan genosida.

- **Krisis Air Bersih di Wilayah Reservasi Masyarakat Adat**

Masyarakat adat di wilayah reservasi diketahui telah lama mengalami krisis air bersih. Baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan dasar lainnya. Kanada sendiri bukan merupakan negara yang kesusahan air. Provinsi Ontario merupakan salah satu provinsi yang berbagi wilayah *great lakes* yang mengandung sebanyak 18% air dunia dengan beberapa negara bagian Amerika (Human Rights Watch, 2016). Maka, akses terhadap air bersih seharusnya bukanlah menjadi masalah yang dihadapi oleh warga Kanada. Namun, kenyataan yang dijumpai di wilayah reservasi masyarakat adat di Kanada adalah berbeda. Air yang didistribusikan oleh pemerintah Kanada ke wilayah - wilayah reservasi justru malah sudah tercemar oleh bahan kimia, susah untuk diakses, atau beresiko untuk dikonsumsi karena adanya kesalahan dalam pengolahan air tersebut.

Kualitas air minum yang buruk merupakan sebuah permasalahan kesehatan publik terburuk yang pernah terjadi di wilayah reservasi pada era tahun 1950-an. Lima dekade kemudian, setelah adanya peninjauan pada sistem pengolahan air wilayah reservasi, ditemukan bahwa hampir sepertiganya memiliki resiko kesehatan, 118 dari 630 komunitas masyarakat adat first nations ada dibawah peringatan bahwa air minum mereka tidak dianjurkan untuk dikonsumsi (Centre for Aboriginal Health Research, 2011). Berdasarkan pengamatan dan peninjauan yang dilakukan oleh organisasi Human Rights Watch, ditemukan bahwa pemerintah Kanada telah melakukan pelanggaran dari sejumlah obligasi hak asasi manusia internasional kepada masyarakat first nations dan komunitas lainnya dengan kegagalannya untuk mengatasi krisis air yang parah ini (Human Rights Watch, 2016). Temuan ini diketahui setelah berdialog dengan beberapa tetua adat.

Dampak dari krisis air ini cukup berbahaya bagi kesehatan karena dalam sampel air yang telah diteliti, ditemukan bakteri seperti *Escherichia coli* (*E. coli*), bahan kimia trihalomethanes yang dapat menyebabkan kanker, serta uranium. Beberapa dari sampel yang diambil dapat terjadi secara natural, dan beberapa dari sampel ini juga dapat dikarenakan oleh pengolahan limbah air yang buruk. Ada juga yang berasal dari alam karena sumber air yang buruk yang kemudian bereaksi dengan bahan kimia yang ditujukan untuk melakukan desinfeksi kepada air tersebut.

Resiko kesehatan yang dihadapi apabila mengonsumsi air tersebut adalah macam – macam. Mulai dari sakit perut atau sakit pencernaan biasa, hingga penyakit kanker (Human Rights Watch, 2016). Pemakaian air ini diluar tubuh juga memiliki resiko timbulnya penyakit kulit. Berdasar pengamatan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch*, hampir seluruh rumah yang diawasi oleh human rights watch, melaporkan akan adanya laporan mengenai penyakit kulit yang menjangkiti anggota keluarga mereka.

- **Protes Gerakan *Idle No More***

Gerakan protes juga tercatat telah lama dilakukan oleh masyarakat adat. Namun, gerakan protes yang cukup besar datang dari gerakan '*Idle No More*' yang hingga saat ini tercatat sebagai gerakan aktivisme masyarakat adat terbesar dalam sejarah Kanada. Gerakan ini pertama kali muncul pada November 2012 di Kanada dengan tujuan untuk melakukan protes terhadap eksploitasi kekayaan alam yang dilakukan oleh pemerintah Kanada pada saat itu di wilayah milik masyarakat adat (Hopper, 2012). Salah satu tokoh yang disorot dalam gerakan ini adalah Theresa Spence, seorang pemimpin dari Attawapiskat First Nations dari Kanada Utara. Wilayah masyarakat adat yang dipimpin oleh Spence juga kebetulan sedang mengalami krisis tempat tinggal sejak tahun sebelumnya. Gerakan Idle No More sendiri berhasil mengumpulkan dan menyatukan massa Masyarakat adat yang datang dari berbagai daerah di Kanada. Mereka melakukan aksinya dengan melakukan aksi mogok makan agar pemerintah

Kanada yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Stephen Harper, mau untuk bertemu dan melakukan diskusi dengan perwakilan dari protestor mengenai eksploitasi Sumber Daya Alam di wilayah pemukiman Masyarakat Adat beserta tindakan – tindakan yang berhubungan dengan kolonialisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada terhadap masyarakat adat.

Salah satu ‘pemantik’ dari gerakan dari gerakan *idle no more* ini adalah perumusan dari *omnibus law bill* atau yang juga dikenal sebagai Bill C-45. Bagi masyarakat adat di Kanada, undang – undang ini merugikan mereka dari sisi pemanfaatan sumber daya alam, bahkan juga dari pengolahan air. Pihak masyarakat adat khawatir akan adanya kerusakan lingkungan seperti pencemaran air apabila undang – undang ini di sahkan. Bill C-45 ini cenderung menguntungkan industri perminyakan di Kanada (Graveline, 2012). Masyarakat adat Kanada tidak ingin terjadi bencana bocornya pipa minyak yang dibangun oleh perusahaan minyak seperti yang terjadi pada pipa milik perusahaan *enbridge* yang minyaknya mencemari Sungai Kalamazoo di Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu (Graveline, 2012). Tidak hanya minyak saja, akses pada perairan di Kanada juga dibatasi dan bisa hanya dapat diakses oleh pihak – pihak industri saja. Padahal seperti yang diketahui, masyarakat adat di Kanada telah lama mengalami krisis air bersih, baik secara akses maupun kebersihan dari air itu sendiri.

Berbeda dengan protes – protes sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat adat beberapa waktu yang lalu, Idle No More mendapatkan dukungan dari hampir seluruh kepala masyarakat adat di Kanada. Bahkan, protes yang diadakan oleh Idle No More mendapat perhatian dari dua kandidat calon Perdana Menteri dari Partai Liberal. Salah satu dari dua kandidat tersebut adalah Justin Trudeau yang kemudian mengunjungi Spence dikala ia masih menjalankan aksi mogok makannya. Hingga saat ini, gerakan *Idle No More* masih berlangsung. Gerakan ini selain melakukan protes terhadap hal – hal yang menyangkut eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di wilayah yang menjadi hak milik masyarakat adat, mereka juga melakukan protes terhadap berbagai macam ketidakadilan yang terjadi kepada masyarakat adat di Kanada.

2.2. United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People

2.2.1. Sejarah

Proses pembentukan UNDRIP memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat tersusun seperti saat ini. Diawali pada tahun 1982 dimana Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) milik Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok kerja. Kelompok Kerja tersebut disebut dengan *Working Group on Indigenous Population (WGIP)*, yang dibentuk sebagai hasil studi dari Jose Martinez-Cobo mengenai permasalahan diskriminasi yang dihadapi oleh masyarakat adat (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 2007). Kelompok kerja tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengembangan mengenai standar hak asasi manusia apa saja yang dapat diberlakukan untuk melindungi hak – hak masyarakat adat.

Setelah itu, pada tahun 1985 draft UNDRIP mulai disusun oleh kelompok kerja. Pada akhirnya, naskah akhir untuk deklarasi hak – hak masyarakat adat disetujui pada tahun 1993. Kemudian, naskah tersebut dikirimkan kepada sub-komisi untuk pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas, yang kemudian menyetujuinya pada tahun 1994. Draft deklarasi tersebut kemudian dikirim ke Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang kemudian membentuk kelompok kerja baru yang dikhususkan untuk membahas tentang *draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.

Sudah sejak lama masyarakat adat menyuarkan apa yang ingin mereka sampaikan ke panggung internasional dan juga kepada organisasi – organisasi internasional (Coates 2013). Banyak organisasi masyarakat adat, tidak terkhususkan pada mereka yang berasal dari wilayah yang diduduki oleh koloni – koloni Inggris saja, namun juga dari wilayah lainnya. Bahkan masyarakat adat sempat mengirimkan utusan ke negara asal koloni seperti Inggris, untuk mengunjungi penguasa imperial (Coates, 2013). Banyak perwakilan – perwakilan dari masyarakat adat yang meminta para penguasa imperial untuk mengakui adanya hak – hak masyarakat adat. Sejumlah petisi juga sempat diedarkan dan sampai ke Paris dan London serta ke lokasi – lokasi pusat kolonial lainnya untuk mendapatkan perhatian terhadap perlunya untuk melindungi hak – hak masyarakat adat seperti hak panen dan juga untuk menghormati perjanjian – perjanjian yang telah disepakati oleh pemerintah kolonial dengan masyarakat adat setempat (Coates 2013).

Memasuki abad ke 20, masyarakat adat masih tetap memperjuangkan hak – hak mereka. *Six Nations* dari Kanada mengirimkan petisi kepada Liga Bangsa – Bangsa dalam rangka meminta dukungan dan pengakuan. Namun, sayangnya usaha tersebut membuahkan hasil yang sedikit. Usaha ini juga dilakukan setelah lahirnya Perserikatan Bangsa – Bangsa, dimana masyarakat adat seringkali mengutip dokumen – dokumen milik Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk meminta dukungan atas pengakuan, otonomi, dan juga keadilan sosial. Usaha masyarakat adat baru dirasa membuahkan hasil setelah memasuki era tahun 1980 an dimana pada era tersebut permulaan pencetusan *Declarations on the Rights of Indigenous People* diramu.

Perlu waktu setidaknya dua puluh dua tahun bagi *United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People* untuk disahkan. Deklarasi ini dapat dianggap sebagai puncak dari perjuangan dari masyarakat adat dalam menyuarakan mengenai pengakuan atas hak – hak mereka. Proses adopsi deklarasi ini dilakukan pada saat sesi ke-61 Sidang Umum PBB pada periode tahun 2006 – 2007 (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 2007). Sewaktu disahkan, ada 143 negara anggota yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan deklarasi tersebut, dengan 11 negara menyatakan bahwa mereka memilih untuk abstain atau tidak memberikan suara mereka, serta 4 negara yakni Australia, New Zealand, Amerika Serikat dan Kanada memilih untuk menolak deklarasi ini dengan argumen bahwa deklarasi ini tidak sejalan dengan konstitusi yang berlaku di negara mereka.

2.2.2. Respon Negara – Negara atas UNDRIP

Setujunya Perserikatan Bangsa – Bangsa atas United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples tidak secara otomatis membuat seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa juga menyetujui Deklarasi tersebut. Pada awal disahkan, negara – negara besar seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Federasi Rusia dan Kanada menyuarakan bahwa mereka memilih untuk menentang deklarasi tersebut. Adopsi deklarasi tersebut juga disambut hangat oleh Presiden Majelis Umum PBB sesi ke 61, yakni Yang Mulia Sheikh Haya Rashed Al Khalifa dari Bahrain dan juga Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, Ban Ki-moon. Sheikh Haya pun menganggap bahwa momen adopsi deklarasi ini memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat adat di seluruh dunia dan merupakan sebuah langkah besar dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia dan juga kebebasan fundamental bagi semuanya. Namun ia juga mengingatkan bahwa meskipun dengan adanya kemajuan, masyarakat adat juga masih banyak mengalami diskriminasi dan terpinggirkan (United Nations 2007).

Bolivia adalah salah satu negara yang telah mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* menjadi hukum negara mereka pada tahun yang sama. Bahkan pada tahun 2009, Bolivia menggabungkan UNDRIP dengan konstitusi baru negara mereka (Erni & Tugendhat 2011).

Pada tahun 2007, dua pedesaan suku Maya yang bernama Conejo dan Santa Cruz di Belize mengajukan gugatan kepada pemerintah Bolivia karena telah mengizinkan kegiatan penebangan hutan, pengeboran minyak dan juga perusahaan hidro-elektrik untuk membatasi akses petani suku Maya terhadap lahan leluhur mereka sendiri. Pengadilan Belize pada akhirnya memutuskan untuk memenangkan pihak masyarakat desa suku Maya dan memerintahkan pihak Pemerintah Bolivia untuk mengakui hak adat suku Maya untuk menggunakan lahan mereka dan menghentikan segala bentuk aktivitas dan proyek yang dapat menyebabkan masyarakat adat tidak mengolah lahan mereka.

Putusan pengadilan tinggi di Belize tersebut merupakan keputusan pengadilan pertama yang menggunakan beberapa poin dari UNDRIP. Keputusan pengadilan di Belize ini dipandang dapat mempengaruhi kasus – kasus serupa di belahan dunia lainnya (Erni & Tugendhat 2011).

Sambutan hangat juga diberikan oleh negara – negara Afrika, meskipun mereka meminta beberapa hal untuk diganti dalam deklarasi tersebut (Survival International 2007). Dari 53 Negara di Benua Afrika, hanya 3 saja yang memutuskan untuk abstain atau tidak memberikan suaranya pada saat pengambilan keputusan untuk mengadopsi deklarasi tersebut (Crawhall 2011). Permasalahan mengenai betapa rapuhnya komunitas masyarakat adat di Benua Afrika banyak dianggap sepele oleh para pemimpin Afrika. Forum regional seperti *African Commission on Human and People's Rights* (ACHPR) dan juga *Indigenous People's of Africa Coordinating Committee* (IPACC) menjadi suara nalar bagi pihak masyarakat adat di Afrika (Crawhall 2011). Dari kedua organisasi regional ini, ACPHR berperan sebagai forum utama untuk berdebat, juga menjadi pihak yang memunculkan alasan – alasan masuk akal, etika dan juga keadilan. Meskipun sampai sekarang masing masing sering diabaikan oleh para pemimpin negara – negara Afrika, ACHPR menjadi eksponen utama dari dasar hukum dalam mengakui adanya kerentanan dikalangan masyarakat adat di kawasan Afrika dan juga dalam melakukan sinkronisasi terhadap UNDRIP dengan African Charter of Human and People's Rights (Crawhall 2011).

Salah satu negara yang memilih untuk menjadi oposisi dari UNDRIP ini adalah Selandia Baru, yang menjadi rumah bagi suku Maori yang merupakan masyarakat adat di Negara tersebut. Pada awalnya Selandia Baru memilih untuk tidak menandatangani perjanjian ini karena memandangnya sebagai tidak sejalan dengan hukum domestik milik Selandia Baru. Langkah yang dipilih oleh Selandia Baru tentu memunculkan banyak kritik. Baik dari dalam maupun luar negeri. Kritik dari dalam negeri tentu datang dari pihak suku Maori sendiri, yang persentase populasinya mencakup 15% dari 4.5 Juta penduduk Selandia Baru

(International Working Group for Indigenous Affairs 2019). Hubungan antara masyarakat Maori dan Pemerintah Selandia Baru diatur dalam *Treaty of Waitangi* yang ditandatangani pada tahun 1840. Mereka juga memiliki Waitangi Tribunal yang memiliki tugas untuk menegakan laporan – laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru terhadap *Treaty of Waitangi*. Meskipun begitu, ketimpangan masih terjadi diantara masyarakat suku Maori di Selandia Baru dengan masyarakat non-indigenous.

Setelah melalui banyak pertimbangan, Selandia Baru memutuskan untuk menjadi salah satu negara yang menyetujui UNDRIP pada tahun 2010 silam. Dr. Pita Sharples, Menteri Maori Selandia Baru pada saat itu menyatakan bahwa Selandia Baru akan menegakan isi dari UNDRIP yang konsisten dengan hukum domestik Selandia Baru. Namun, dalam prakteknya, Selandia Baru dinilai tidak konsisten dalam menerapkan UNDRIP dan menurut International Working Group for Indigenous Affairs, masih banyak hak – hak masyarakat Maori yang belum terpenuhi meskipun Selandia Baru telah menyetujui UNDRIP dan memiliki badan – badan yang ditugaskan untuk menegakan hak – hak masyarakat maori seperti Waitangi tribunal.

Negara yang juga memilih untuk tidak menyetujui UNDRIP pada tahun 2007 silam dan kemudian merubah sikap mereka adalah Australia. Banyak yang sangat menyayangkan karena dalam catatan sejarah, masyarakat aborigin di Australia tidak menerima perlakuan yang dapat dibilang perlakuan yang adil oleh Pemerintah Australia. Pasalnya, pada saat pemerintah Australia meresmikan konstitusi mereka pada tahun 1901, pemerintah Australia tidak mengakui masyarakat aborigin dan Torres Strait Islander sebagai bagian dari Australia. Bahkan, Australia memiliki sejarah yang kelam sehubungan dengan perlakuan para pendatang dari Eropa dengan masyarakat aborigin. Mulai dari tindakan opresif, asimilasi yang dipaksakan, serta pembantaian terhadap masyarakat Aborigin. Namun, Selama lima puluh tahun terakhir, Pemerintah Australia mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat

aborigin. Dimulai dari tahun 1967 ketika Pemerintah Australia memutuskan untuk melakukan referendum terhadap Konstitusinya dan memberikan hak – hak yang sama seperti warga Australia lainnya kepada masyarakat Aborigin (Mellor, Bretherton and Firth, 2007).

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, Australia secara resmi merubah sikapnya terhadap UNDRIP. Perubahan sikap ini mendatangkan respon yang beragam, baik positif maupun negatif. James Crawford, seorang praktisi hukum Australia menilai bahwa dengan diadaptasinya UNDRIP dapat membentuk hukum yang lebih progresif kedepannya (Maguire 2014). Seiring berjalannya waktu, Australia yang pada awalnya berpegang pada sifat tidak mengikat dari UNDRIP karena pemerintah Australia mulai menjadikan UNDRIP sebagai referensi pembentukan hukum. Meskipun begitu, Australia masih memiliki jalan yang cukup panjang dihadapannya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat aborigin di negara mereka.

Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama dengan Selandia Baru dan Australia. Pada awalnya menolak, namun akhirnya merubah sikapnya beberapa tahun kemudian. Pada tahun 2007, ketika UNDRIP dideklarasikan Amerika Serikat memutuskan untuk tidak menyetujui deklarasi tersebut, namun kemudian pada tahun 2010, Amerika Serikat menyatakan dukungannya atas UNDRIP. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Presiden Obama bersamaan dengan momen '*Native Heritage Month*' (U.S Department of State 2011). Keputusan untuk meninjau kembali posisi Amerika Serikat terkait dengan Deklarasi ini adalah karena banyaknya suara yang disampaikan oleh suku – suku indigenous Amerika Serikat mengenai bagaimana pentingnya kontribusi deklarasi ini pada kebijakan – kebijakan Amerika Serikat pada masa mendatang dan juga untuk menghormati warga indigenous di Amerika Serikat (U.S Department of State 2011). Keputusan Amerika Serikat untuk memberikan dukungannya kepada UNDRIP disambut dengan hangat oleh banyak kepala masyarakat indigenous di Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya dalam jangka waktu belakangan, masyarakat indigenous banyak melakukan protes atas tindakan pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya adalah mengenai masalah pembangunan beberapa jalur pipa seperti Keystone XL, Dakota Access dan Enbridge Access, yang pada masa pemerintahan sebelumnya telah sepakat untuk diberhentikan proses pembangunannya (International Working Group for Indigenous Affairs 2019). Keputusan Administrasi Presiden Trump menunjukkan keterbalikan pernyataan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan dukungannya terhadap UNDRIP dan mengambil keputusan untuk memberhentikan pembangunan jalur pipa yang melewati wilayah yang dianggap suci oleh masyarakat a sekitar.

2.2.3. Tindakan Kanada atas UNDRIP

Pada saat di deklarasikan untuk pertama kalinya pada tahun 2007 lalu, Kanada bersama empat negara lainnya tidak memberikan dukungannya terhadap United Nations Declarations for the Rights of Indigenous People. Meskipun pada tahun 2010 lalu Kanada, yang pada awalnya menolak UNDRIP memutuskan untuk menyatakan dukungannya, Kanada belum mewujudkan banyak aksi nyata yang menghasilkan dukungan dari pihak Masyarakat Indigenous di Kanada. Bersama dengan keempat negara lainnya yang menolak, pembenaran yang diberikan oleh Kanada adalah kebijakan dalam negeri mereka yang berkaitan dengan hak – hak masyarakat indigenous sudah sesuai bahkan melebihi standar Internasional.

Pada saat UNDRIP dideklarasikan pada tahun 2007 hingga 2010 silam, Kanada berada dibawah pemerintahan yang didominasi oleh partai Konservatif. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Indigenous pada saat itu adalah kasus hilang dan dibunuhnya gadis dan wanita Indigenous. Permasalahan ini dinilai cukup mengkhawatirkan hingga menjadi perhatian nasional. Stephen Harper sebagai perdana menteri yang menjabat pada saat itu pun memilih untuk tidak mendirikan tim khusus untuk menangani kasus tersebut ketika dicecar pertanyaan mengenai penyelesaian masalah tersebut.

Pernyataan dukungan kepada UNDRIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kanada pada tahun 2010 lalu juga tidak luput dari hasil tekanan yang berasal dari tokoh – tokoh dan juga banyak organisasi masyarakat indigenous yang mendesak Pemerintah Kanada untuk merubah sikapnya terkait dengan UNDRIP. Pemerintah saat itu pun pada akhirnya memutuskan untuk memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka mendukung UNDRIP. Pernyataan tersebut diunggah ke situs resmi pemerintah Kanada. Di dalamnya, salah satu pernyataan yang juga dinyatakan oleh ke empat negara lainnya yang menentang UNDRIP adalah pernyataan yang menyatakan bahwa meskipun Kanada memberikan dukungannya kepada UNDRIP, Kanada menganggap UNDRIP sebagai sesuatu yang bersifat *non-binding* dan tidak akan merubah hukum domestik milik Kanada.

Meskipun Kanada menyatakan bahwa kebijakannya mengenai masyarakat indigenous di negaranya telah memenuhi standard dan bahkan melebihi standar Internasional, laporan yang diserahkan kepada *Universal Periodic Review* (UPR) milik Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai kondisi hak asasi manusia, khususnya dibidang hak masyarakat indigenous di Kanada, menunjukkan fakta –fakta yang sebaliknya (International Working Group for Indigenous Affairs, 2010). Pada kesempatan yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2009 silam itu, hampir tiga per empat negara yang

berpartisipasi menunjukkan kekhawatirannya terhadap kondisi masyarakat Indigenous yang ada di Kanada, terutama mengenai kondisi wanita dan anak – anak dari masyarakat indigenous (International Working Group for Indigenous Affairs, 2010). Banyak negara yang menyarankan Kanada untuk melakukan peninjauan kembali atas posisinya terhadap *UN Declaration on the Rights of Indigenous People*. Namun, permintaan tersebut kemudian ditolak oleh pemerintah Kanada pada bulan Juni di tahun yang sama (International Working Group for Indigenous Affairs, 2010).

Kanada membutuhkan waktu hingga hampir 10 tahun untuk mengubah sikapnya atas UNDRIP. Perubahan sikap tersebut terjadi setelah pemerintahan Kanada yang sebelumnya dipimpin oleh pemerintahan yang didominasi oleh partai konservatif, beralih dipimpin oleh pemerintahan yang didominasi oleh partai liberal setelah diadakannya pemilihan umum pada tahun 2015 silam. Perdana Menteri terpilih, Justin Trudeau menyatakan bahwa ia berkomitmen untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah Kanada dengan masyarakat Indigenous di Kanada (International Working Group for Indigenous Affairs 2016).

Komitmen Pemerintah Kanada terhadap kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat Indigenous sebelum tahun 2015 tidak begitu terlihat. Selain permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Stephen Harper pada tahun 2008 lalu atas kekejaman sistem *Residential School*. Beberapa hal terkait permasalahan masyarakat indigenous di Kanada yang cukup krusial seperti masalah kemiskinan yang terjadi di wilayah reservasi – reservasi yang menjadi tempat tinggal masyarakat Indigenous kurang diperhatikan. Bahkan, mengenai kasus *Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* yang notabene adalah masalah yang cukup serius sehingga memicu adanya protes dikalangan masyarakat adat, dinilai sebagai masalah yang tidak cukup serius.

Setelah tahun 2015, pemerintah Kanada mulai melakukan perbaikan atas hubungannya dengan kelompok masyarakat adat. Seperti penanganan kemiskinan yang terjadi di kawasan – kawasan reservasi yang menjadi wilayah tempat tinggal masyarakat adat, serta memutuskan untuk mengadakan review atau *National Inquiry* terhadap kasus *Missing and Murdered Indigenous Women and Girls*. Dalam mengatasi kemiskinan, Investasi anggaran negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kanada dibawah kepemimpinan Justin Trudeau dialokasikan untuk membangun komunitas masyarakat adat yang lebih baik. Dibandingkan dengan solusi sebelumnya yang justru membuat masyarakat adat terus hidup dalam kemiskinan karena menggantungkan sumber pendapatan rumah tangga mereka kepada dana yang diberikan oleh negara (Clarke 2018).